

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Yogyakarta terletak di bagian selatan provinsi Jawa Tengah yang padat penduduknya di negara Indonesia. Yogyakarta merupakan daerah istimewa pada saat zaman pendudukan Jepang dan Belanda, karena memiliki pemerintahan sendiri.¹ Pada saat pemerintahan kolonial Belanda, kota Yogyakarta mengalami kemunduran diberbagai bidang, antara lain bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Kemunduran tersebut disebabkan karena taktik pemerintah Hindia Belanda yang menghancurkan fasilitas umum di Yogyakarta, dan pada masa akhir pendudukan Hindia Belanda, masyarakat Yogyakarta mengalami kesulitan.²

Penduduk Yogyakarta sendiri terdiri dari berbagai etnis, diantaranya etnis Jawa. Etnis Jawa banyak dijumpai di Yogyakarta. Etnis Jawa juga mencakup berbagai lingkup etnis yang lain, salah satunya etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa sendiri bukanlah etnis yang baru di Jawa, namun sudah bisa dijumpai pada awal abad XIV di Jawa, dan mulai berkembang.³ Etnis Tionghoa sendiri di mata pribumi dipandang sebagai warga yang terpinggirkan. Pada era Orde Lama, keluar PP. No 10 tahun 1959 yang melarang warga Negara asing (WNA) Tionghoa

¹ Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990, hlm 15.

² Tashadi, dkk, *Sejarah Kebangkitan Nasional DIY*, Jakarta: Depdikbud, 1977. hlm 145-146.

³ Agus Gunawan Satyaputra, *Misi di Tengah Etnis Tionghoa Indonesia: Suatu Perspektif Sejarah*, Teologi Stulos, 2004, Vol. I No, 3, hlm 83.

untuk berdagang eceran di daerah di luar ibu kota provinsi dan kabupaten. Hal ini menimbulkan polemik terhadap distribusi barang dan pada akhirnya menjadi salah satu penyebab keterpurukan ekonomi menjelang tahun 1965. Pada saat Orde Baru berkuasa, etnis Tionghoa menjadi warga yang semakin terpinggirkan. Potret buram etnis Tionghoa begitu terlihat dalam sejarah kelam bangsa Indonesia. Periodenya yang begitu panjang, dengan diawali datangnya nenek moyang orang Tionghoa mulai abad IX yang pada akhirnya diikuti migrasi besar-besaran dari Tiongkok abad XIX sampai pada awal abad XX.⁴

Dalam catatan perjalanan di negeri ini, etnis Tionghoa sering kali menjadi sasaran kekerasan ataupun pembunuhan seperti pembantaian Tionghoa pada masa perang Jawa 1825-1930, pembantaian di Batavia 1740 yang menewaskan lebih dari 10.000 orang Tionghoa oleh pasukan VOC. Menurut Benny G Setiono, dalam kerusuhan tersebut yang berlangsung selama dua minggu tidak kurang dari 10.000 ribu orang Tionghoa tewas dibunuh dengan cara disembelih, dibakar hidup-hidup dan juga ditembak. Itu adalah sebuah peristiwa yang kemudian dikenal dengan *Chineezenmoord* (Pembantaian orang-orang China) di Batavia. Banyak sejarawan menduga, otak dari *genocide* (pembersihan etnis) itu adalah VOC, karena Tionghoa dianggap sebagai pesaing strategis dalam bidang perekonomian. Pembunuhan massal etnis Tionghoa di Jawa pada 1946-1948, peristiwa rasialis 10 Mei 1963, Malari 1974 dan terakhir Mei 1998.⁵

⁴ Dennis Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya*, Trj. Yogyakarta: LKiS, 1999, hlm. 200.

⁵ Benny G Setiono, *Tionghoa dalam pusaran Politik* (Elkasa: Jakarta, 2002), hlm 570.

Pada masa Kebangkitan Nasional dapat dicontohkan peristiwa Kudus terjadi tahun 1918, penyebabnya karena beberapa pemuda Tionghoa dengan anggota Sarekat Islam (SI). Selain itu juga di daerah lain seperti di Tangerang terjadi pembunuhan massal yang terjadi tahun 1946, kemudian dikenal dengan Peristiwa Tangerang. Dalam kerusuhan yang terjadi selama 5 hari (3-8 Juni 1946) itu tidak kurang dari 600 orang Tionghoa dibunuh, lebih dari 1.000 rumah Tionghoa dibakar dan sekitar 25.000 orang Tionghoa harus mengungsi dari Tangerang ke Jakarta.⁶

Kisah buram di atas merupakan sedikit contoh tentang masyarakat pribumi yang sangat membenci etnis Tionghoa dan telah melupakan sejarah asimilasi yang terserap berabad-abad lamanya di negeri ini. Dalam sejarah revolusi tahun 1945-an kita telah menyaksikan sikap nasionalisme seorang Djiaw Kie Siong⁷ yang memperbolehkan rumahnya dipakai untuk rapat mempersiapkan kemerdekaan Indonesia oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Dalam perjuangan fisik maupun non fisik banyak pahlawan dari etnis Tionghoa yang terjun langsung dalam upaya memerdekakan negeri ini, misalnya *Republik Lan Fong*⁸ adalah sebuah organisasi

⁶ *Ibid*, hlm. 577.

⁷ Djiaw adalah seorang petani kecil keturunan Tionghoa. Lihat: lima-fakta – penting –rumah –hijau –rengasdengklok- 394166. html dalam wisata.kompasiana. com/jalan-jalan/. Diakses 6 Maret 2013.

⁸ Pada akhir abad ke-18, tepatnya 1777, seorang Tionghoa (klan Hakka/Khek) dari Kwantung bernama Lo Fong Pak mendirikan pemerintahan sendiri. Lihat <http://primbondonit.blogspot.com/2011/09/republik-lan-fang-di-mandor-kalbar.html>, diakses pada 7 April 2012

etnis Tionghoa yang berperang melawan Belanda pada abad XIX, tetapi sayang namanya jarang didengar oleh khalayak.

Sementara itu, memasuki era reformasi tahun 1998 membawa angin segar bagi etnis Tionghoa. Sosok presiden Abdurrahman Wahid yang merupakan sosok figur paling berjasa bagi etnis Tionghoa Indonesia dengan diterbitkannya Kepres No 6/2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 yang di dalamnya berisi tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Inpres Presiden Soeharto berisi tentang pelarangan ekspresi serta kepercayaan orang Tionghoa di depan umum. Hal itu membuat Tionghoa di Indonesia seperti tidak diakui. Atraksi Barongsai yang merupakan salah satu simbol budaya mereka juga tarian naga ular tidak bisa bebas berekspresi didepan umum pada masa Orde Baru. Pada era Megawati Soekarnoputri juga dikeluarkan Kepres No 19/2002 terhitung tanggal 9 April 2002 yang meresmikan Imlek⁹ sebagai hari raya Nasional.¹⁰

Dewasa ini, komunitas Tionghoa sudah merasa lega karena pada era reformasi mereka mendapat perlindungan hukum yang sangat kuat atas status kewarganegaraannya. Ini merupakan sebuah karya monumental anak bangsa yang dapat mengubah sikap pandang dan paradigma perilaku. Sekarang ini, keaslian suku bangsa Indonesia sudah tidak lagi memandang ciri-ciri fisik dan garis keturunannya saja. Hal ini merupakan salah satu keanekaragaman Indonesia kita.

⁹ Tahun Baru Imlek merupakan perayaan terpenting orang Tionghoa. Lihat: Tahun Baru Imlek Bagi Muslim Tionghoa_GudegNet-Gudang Info Kota Jogja.htm. diakses 7 Maret 2013.

¹⁰ Keputusan Presiden Indonesia Nomor 19 tahun 2002. Tentang Tahun Baru Imlek. Lihat <http://www.legalitas.org>, diakses pada 1 April 2012

Dari uraian diatas, dapat digambarkan secara umum, pertama bagaimana masuknya etnis Tonghoa ke Indonesia serta ke Yogyakarta. Kedua, keadaan etnis Tionghoa baik yang muslim maupun non muslim sebelum reformasi 1998. Ketiga, keadaan dari etnis Tionghoa Islam di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik pasca reformasi di Yogyakarta. Oleh karena itu kajian ini berusaha menelusuri jejak interaksi Tionghoa dengan pribumi. Penulis juga mencoba memberikan deskripsi mengenai sejarah dinamika Tionghoa dengan pribumi dalam rentang yang cukup panjang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana latar belakang masuknya etnis Tionghoa Islam di Yogyakarta?
2. Bagaimana kondisi etnis Tionghoa Islam sebelum reformasi tahun 1998?
3. Bagaimanakah keadaan etnis Tionghoa Islam di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik pasca reformasi di Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan khusus

- a. Mengetahui latar belakang masuknya etnis Tionghoa Islam di Yogyakarta.
- b. Mengetahui keadaan Tionghoa Islam sebelum reformasi 1998.

- c. Mengetahui keadaan etnis Tionghoa Islam dalam bidang sosial, ekonomi, budaya dan politik pasca reformasi di Yogyakarta.

2. Tujuan Umum

- a. Melatih daya pikir yang kritis, analisis, sistematis dan objektif serta peka terhadap fenomena yang terjadi pada masa sekarang dan yang akan datang.
- b. Mengembangkan serta menambah karya penulisan ilmiah, terutama dalam bidang sejarah. Mengetahui peran etnis Tionghoa Islam di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik pasca reformasi di Yogyakarta.
- c. Melatih penyusunan sebuah karya sejarah, khususnya mengenai Tionghoa Islam Indonesia dan Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

- a. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir penulis guna untuk sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
- b. Penulisan skripsi ini dapat digunakan sebagai tolak ukur bagi penulis untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan dan kemampuan penulis dalam menganalisis suatu peristiwa sejarah, serta menyajikannya dalam suatu karya yang obyektif.

2. Bagi pembaca

- a. Dengan membaca skripsi ini diharapkan pembaca mengetahui dan memiliki gambaran yang jelas mengenai Tionghoa Islam di Yogyakarta pasca reformasi.
- b. Memperluas wawasan tentang sejarah Indonesia khususnya mengenai Dinamika Tionghoa Islam pasca reformasi di Yogyakarta.
- c. Dengan skripsi ini diharapkan dapat menambah referensi untuk penelitian-penelitian sejenis dimasa mendatang.

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah jawaban sementara dari rumusan masalah, dan merupakan telaah terhadap pustaka atau literature yang menjadi landasan pemikiran dalam penelitian. Penelitian bisa hanya menggunakan kajian pustaka atau kajian teori atau menggunakan kedua-duanya.¹¹ Melalui kajian pustaka inilah penulis mulai menemukan literature yang akan digunakan dalam menyusun sebuah penelitian sejarah.

Sebenarnya tidak ada catatan pasti kapan masuknya Tionghoa ke Yogyakarta. Sejak berdirinya kasultanan Yogyakarta tahun 1756, etnis Tionghoa telah berada di Yogyakarta. Dari jumlah awal yang sedikit, kemudian semakin banyak yang berdatangan dari berbagai pelosok nusantara, mereka semua rata-rata berprofesi sebagai pedagang. Awalnya mereka bertempat tinggal di daerah

¹¹ Daliman, *Pedoman Tugas Akhir Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi UNY, 2006, hlm 3.

Pecinan yang terletak di utara Pasar Gedhe. Meskipun sudah diatur oleh Belanda ternyata sampai tahun 1830 masih ada orang Tionghoa yang tinggal diluar daerah tersebut dan mereka akibatnya mendapatkan denda dari Belanda. Sekitar tahun 1867 pemukiman Tionghoa mulai menyebar, yakni meliputi Gandekan, Ngabean, Ngadiwinatan, Gaading, Ngasem hingga daerah Patuk ke utara sampai rel kereta api di sebelah Tugu.¹²

Selain itu ada penjelasan yang menjelaskan bahwa orang Tionghoa pada mulanya berada di kampung Kranggan dan kemudian menyebar ke berbagai tempat untuk berdagang. Jumlah mereka tidak terlalu besar yaitu kurang lebih 2-3 persen dari jumlah penduduk pribumi, namun karena semakin bertambahnya orang Tionghoa di Yogyakarta, kasultanan Yogyakarta memberikan izin kepada mereka untuk tinggal di daerah selatan Kranggan hingga perbatasan Pasar Gede (Beskalan dan Ketandan).¹³

Sejarah kehidupan etnis Tionghoa di Indonesia selalu saja diwarnai dengan tindak kekerasan, ini merupakan sikap sentiment penduduk pribumi pada Tionghoa. Sebagai contoh, pada masa VOC terjadi pembantaian di Muara Angke, lebih dari 10.000 orang Tionghoa dibantai oleh pemerintahan VOC.¹⁴ Alasan yang beranggapan bahwa ekonomi Tionghoa lebih unggul dan akan menjadi pesaing

¹² Abdurrachman Surjomihardjo, *Sejarah Perkembangan Kota Yogyakarta, 1889 – 1930*, (Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia), hlm. 48

¹³ Darmasugito, “*200 tahun kota Yogyakarta (7-10-1756 – 7-10-1956)*” (Yogyakarta: Panitia Peringatan Kota Yogyakarta 200 th Sub Panitia Penerbitan, 1956), hlm 23.

¹⁴ Hembing Wijayakusuma, *Pembantaian Massal 1740: Tragedi Berdarah Angke*, (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2005).

yang kuat. Keunggulan etnis Tionghoa dalam bidang ekonomi ini telah mengakibatkan kecemburuan social etnis lain dan menimbulkan prasangka yang tidak baik terhadap etnis Tionghoa. Selain itu ada juga pembantaian yang dilakukan oleh VOC, pada Perang Jawa (1825-1930), pembantaian di Batavia tahun 1740 yang menewaskan lebih dari 10.000 ribu orang Tionghoa juga oleh pasukan VOC.¹⁵

Sementara itu pada masa Orde Lama peran etnis Tionghoa juga tidak boleh dipandang sebelah mata. Pada tahun 1945 ada beberapa orang Tionghoa yang turut merancang UUD 1945 dan menjadi anggota Dokuritu Zunbi Tyoosa Kai. Diantaranya Mr. Tan Po Gwan menjadi Menteri Negara Urusan Tionghoa, Siaw Giok Tjhan diangkat menjadi Menteri Negara mewakili etnis Tionghoa dan Dr. Ong Eng Die dari PNI sebagai Wakil Menteri Keuangan.¹⁶ Di Surabaya ada juga pertempuran yang terjadi melawan pasukan Inggris pada November 1945 juga melibatkan pemuda-pemuda Tionghoa. Pada waktu itu ada seorang pemimpin Tionghoa berpidato di salah satu radio di Surabaya yang isinya menceritakan kekejaman yang dilakukan oleh pasukan tentara Inggris terhadap rakyat Surabaya. Berita tersebut disampaikan oleh salah satu wartawan Merah Putih (Koran yang terbit di Jakarta) yang sempat berkunjung ke tempat pertempuran di Surabaya.¹⁷

¹⁵ Dennis Lombard, *op cit*, hlm. 200.

¹⁶ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante* (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 144.

¹⁷ Benny G Setiono, *op cit* hlm. 571.

Buku yang berjudul “*Masyarakat Islam Tionghoa di Indonesia*” yang ditulis oleh Amen Budiman. Buku ini dapat dijadikan salah satu literature yang cukup signifikan, dengan konsep kajian materi yang menarik untuk dibaca. Buku ini juga berisi gambaran umum tentang awal masuknya Islam yang dibawa oleh Tionghoa. Selain itu juga dapat kita temukan aspek-aspek kebudayaan muslim Tionghoa di Indonesia. Masyarakat Islam Tionghoa di Indonesia mempunyai kebudayaan yang unik, yang merupakan perpaduan dari unsur-unsur kebudayaan Tionghoa, Islam Eropa dan pribumi.

Di era Orde Baru bagi etnis Tionghoa merupakan masa peralihan yang sungguh sulit untuk dijalani nya. Betapa tidak, mereka tidak hanya kehilangan posisinya secara ekonomi maupun politik, melainkan juga kehilangan materi bahkan nyawa mereka melayang. Itu terjadi pada saat Presiden Soeharto berkuasa tahun 1966. Intinya etnis Tionghoa harus menghilangkan Cina-nya dan menjadi Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya prasangka keterlibatan etnis Tionghoa dalam peristiwa pemberontakan PKI.¹⁸ Karena di masa Orde Baru tersebut muncul lah sikap diskriminatif yang diterapkan oleh rezim Soeharto. Bahkan tidak ada yang sanggup melawan peraturan yang diterapkan oleh Presiden Soeharto. Di masa ini lah etnis Tionghoa juga tidak bisa menampilkan kebudayaan khas mereka, seperti kesenian Barongsai, bahkan merayakan Imlek pun masih dilarang.

Buku yang berjudul *Muslim Tionghoa*, terbitan Jakarta, Yayasan Ukhuwah Islamiyah, yang ditulis oleh Yunus Yahya. Dalam buku tersebut menggambarkan

¹⁸ Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah partai politik di Indonesia yang berideologi komunis. Lihat: <http://politik.kompasiana.com>. Diakses pada 6 Maret 2013

gambaran dan perkembangan Muslim Tionghoa yang ditulis dalam bentuk karangan-karangan oleh para cendekiawan dan para tokoh Islam di Negara Indonesia sebagai respon terhadap meningkatnya kegiatan dakwah Islamiyah di lingkungan masyarakat Tionghoa.

Hingga memasuki awal era reformasi, etnis Tionghoa dapat bernafas lega. Pada era Presiden Abdurrahman Wahid yang merupakan figur paling berjasa bagi etnis Tionghoa, karena beliau telah menerbitkan Kepres No 6/2000 dan ditandatangani pada 17 Januari 2000 sekaligus mencabut Inpres No 14/1967 yang ditandatangani Soeharto pada 6 Desember 1967. Kepres tersebut berisi tentang pencabutan instruktur presiden nomor 14 tahun 1967 yaitu tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina.

F. Historiografi yang relevan

Historiografi adalah rekonstruksi sejarah melalui proses pengujian dan menganalisis secara *kritis* rekaman-rekaman peninggalan masa lampau¹⁹. Sejarah yang ada pada masa kini adalah merupakan gambaran dari masa lampau yang ditulis oleh manusia masa kini. Dalam hal ini, penggunaan metode sejarah sangat penting sebagai suatu cara untuk merekonstruksi masa lampau. Dalam penulisan sejarah, penggunaan historiografi yang relevan merupakan hal yang mutlak. Terdapat empat aspek sebagai ukuran relevansi yakni; aspek biografis, aspek geografis, aspek kronologis dan aspek fungsional. Keempat aspek tersebut harus terdapat dalam suatu tesa. Historiografi ini bisa berupa buku sejarah, disertasi,

¹⁹ Louis Gottschalk, "Understanding History : A Primer of Historical Method", a.b. Nugroho Notosusanto, *Mengerti Sejarah*. Jakarta : UI Press, 1982, hlm. 94.

tesis, skripsi, yang validitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Maksud dari historiografi yang relevan adalah untuk dapat membedakan karya sejarah yang akan ditulis dengan karya-karya sejarah yang telah ditulis. Skripsi yang mengkaji tentang Tionghoa Islam diantaranya:

Skripsi yang berjudul “*Relasi sosial Muslim Tionghoa dan non Muslim Tionghoa di Kodya Yogyakarta*”, ditulis oleh Triana Yudawati dari IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 2002. Skripsi ini dapat dijadikan referensi yang cukup elegan untuk menunjang penulisan skripsi ini. Tulisan ini cukup kontekstual dalam menggambarkan muslim Tionghoa di Yogyakarta.

Rezsa Maulana dalam skripsinya yang berjudul “*Pergulatan Menjadi Muslim Sejati (Pendekatan teori konflik dalam keluarga orang Tionghoa Muslim di Yogyakarta)*” pada tahun 2008 di Fakultas Ushuludin UIN Sunan Kalijaga. Skripsi ini membahas tentang keluarga Tionghoa yang ingin menjadi muslim sejati. Skripsi ini berbeda dengan yang penulis susun, karena berbeda konteks tujuannya. Skripsi ini lebih fokus ke masalah keluarga Tionghoa.

Ahmad Sidik Tri Haryanto dalam skripsinya yang berjudul “*Kehidupan Sosial Politik Muslim Tionghoa di Yogyakarta Pasca Reformasi 1998-2008*”, pada tahun 2011 di Fakultas Syarriah UIN Sunan Kalijaga. Skripsi ini membahas tentang kehidupan berpolitik, sosial muslim Tionghoa di Yogyakarta, ini berbeda dengan skripsi yang akan disusun, karena skripsi tersebut dibatasi sampai tahun 2008, dan skripsi ini hanya mengupas masalah social dan politik saja.

Selain itu juga ada skripsi yang ditulis oleh Tommy Febrizky yang berjudul *Islam dan Tionghoa (Studi Strategi pengembangan Masyarakat Islam Tionghoa*

pada Lembaga Pembina Iman Tauhid Islam DH Perhimpunan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) di Yogyakarta, di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dari skripsi tersebut membahas tentang strategi pengembangan masyarakat Tionghoa Islam di Yogyakarta melalui organisasi PITI.

Penelitian di atas merupakan penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Persamannya terletak pada objek penelitiannya yaitu Tionghoa Islam. Perbedaannya yaitu terletak pada tujuan penelitiannya. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika Tionghoa pasca reformasi di Yogyakarta (1998-2010).

G. Metode dan Pendekatan Penelitian

1. Metode penelitian

Seperti yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, dalam suatu penulisan sejarah setidaknya ada empat hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu manusia atau pelaku, tempat (ruang lingkup), waktu dan peristiwa atau aktifitas manusia itu sendiri. Untuk menghasilkan suatu karya sejarah yang bermutu, diperlukan suatu metode sejarah yang dapat digunakan untuk merekonstruksi masa lampau. Penulisan sejarah mempunyai metode tersendiri dalam mengungkapkan suatu peristiwa masa lampau agar menghasilkan suatu karya sejarah yang logis, kritis, ilmiah dan obyektif.²⁰

²⁰ Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, hlm. 33-34.

Metode sejarah menurut M. Natsir adalah penyidikan yang kritis terhadap keadaan-keadaan, pengembangan-pengembangan serta pengalaman masa lampau dan menimbang secara teliti dan hati-hati tentang bukti validitas dari sumber sejarah serta interpretasi dari sumber-sumber keterangan tersebut. Sedangkan menurut Louis Gottschalk, metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.²¹ Menurut Nugroho Notosusanto metode sejarah mempunyai empat langkah kegiatan, yaitu Heuristik, Verifikasi, Interpretasi dan Historiografi.²²

a. Heuristik

Heuristik merupakan kegiatan menghimpun jejak-jejak masa lampau yang dikenal sebagai data-data sejarah. Dalam melakukan kegiatan menghimpun jejak atau data-data sejarah, penulis berusaha mencari sumber-sumber yang relevan sebagai bahan kajian untuk menyusun skripsi ini. Dilapangan akan menemukan sumber sejarah berupa sumber sejarah primer dan sumber sejarah sekunder.

Heuristik (pengumpulan data) merupakan kegiatan untuk menemukan sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, seperti buku, jurnal, majalah, koran dan foto-foto. Untuk menjadikan historiografi, perlu dicari sumber-sumbernya (bukti-bukti), baik sumber primer, sekunder, tersier maupun historis. Sumber Sejarah menurut jenisnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

²¹ Louis Gottschalk, *op.cit.*, hlm. 34.

²² Nugroho Notosusanto, *Norma-norma Dasar Penelitian Penulisan Sejarah*, Jakarta: Dephankam, 1971, hlm. 35.

1) Sumber Primer

Menurut Louis Gottschalk, sumber primer adalah kesaksian dari seseorang saksi dengan mata kepala sendiri. Selain itu juga kesaksian menggunakan panca indera yang lain atau juga saksi dengan alat mekanis yang selanjutnya disebut saksi pandang mata. Arti lain sumber primer adalah sumber yang disampaikan oleh saksi mata.²³ Saksi mata yang dimaksud adalah minimal 3 saksi mata, juga ditambah dengan Koran dan majalah.

Pada penelitian ini, peneliti mewawancarai tujuh orang saksi yang mengetahui secara langsung proses masuknya etnis Tionghoa di Yogyakarta. Dari ke tujuh saksi tersebut, empat diantaranya mengetahui secara pasti dan tiga saksi lainnya hanya memberikan gambaran umum.

2) Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi pandang mata, yakni dari seorang yang tidak hadir dalam peristiwa yang dikisahkan. Menurut I Gde Widja, sumber sekunder yaitu kesaksian dari saksi orang lain.²⁴ Jadi dikatakan bahwa sumber sekunder adalah sumber yang berasal dari orang kedua. Adapun sumber sekunder dari penulisan ini diantaranya :

²³ Louis Gottschalk, *op cit*, hlm. 35.

²⁴ I Gde Widja, *Sejarah Lokal Suatu Perspektif dalam Pengajaran Sejarah*. Jakarta : Depdikbud, 1989, hlm. 18.

Amen Budiman. (1979). *Masyarakat Islam Tionghoa di Indonesia*, Semarang: Tanjung Sari.

Benny G, Setiono. (tanpa tahun) *Tionghoa dalam Pusaran Politik*. Jakarta: Elkasa.

William Skinner. (1979). “*Golongan Minoritas Tionghoa*” dalam Mely G Tan, *Golongan Etnis Tionghoa Di Indonesia: Suatu Masalah Pembinaan kesatuan Bangsa*. Jakarta: Gramedia.

Leo Suryadinata. (2002). *Negara dan Etnis Tionghoa, Kasus Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES.

Leo Suryadinata. (1982). *Dilema Minoritas Tionghoa*. Jakarta: Grafiti Pers.

Ong Eng Die. (1979) “*Peranan Orang Tionghoa dalam Perdagangan*” dalam Mely G.Tan. *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

b. Kritik Sumber (Verifikasi)

Kritik sumber dilakukan sebagai upaya untuk menentukan apakah sumber atau data yang didapat valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya baik secara substansial maupun secara fisik. Kritik sumber terdiri dari kritik ekstern (*otentisitas*) dan kritik intern (*kredibilitas*). Kritik ekstern dilakukan untuk mengetahui dokumen itu otentik apa tidak jika dilihat dari segi bentuk, bahan, tulisan dan sebagainya. Sedangkan kritik intern dilakukan untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan persoalan apakah isi sumber dapat dipercaya atau tidak.

Dalam kegiatan kritik sumber, penulis berusaha mencari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pada tahap ini penulis juga melakukan kritik terhadap sumber-sumber

yang telah didapat. Kritik ekstern dilakukan dengan membandingkan sebuah fakta dari isi satu sumber dengan sumber lainnya. Sedangkan kritik intern dilakukan penulis dengan menganalisis apakah sumber-sumber yang didapatkan. Tujuan kritik sumber adalah untuk memberikan penelitian terhadap validitas dan reliabilitas sumber yang dilakukan dengan cara membandingkan sumber-sumber yang terkumpul

c. Interpretasi

Interpretasi (penafsiran) digunakan untuk menafsiran fakta-fakta telah didapat. Penafsiran data-data, diperoleh berdasarkan kekuatan analisis yang diperkuat melalui kajian pustaka dan segi peninjauan (politik, sosiologi dan psikologi). Dalam kegiatan interpretasi penulis berusaha menganalisis sumber-sumber yang ada, kemudian menyusun sumber-sumber tersebut dalam bentuk penulisan skripsi. Tahap intepretasi ini dibagi dalam dua langkah yaitu analisis dan sintesis. Analisis merupakan kegiatan untuk menguraikan sedangkan sintesis berarti mengumpulkan.

d. Historiografi

Historiografi merupakan sebuah kegiatan menyusun fakta-fakta menjadi sejarah, setelah melakukan pencarian sumber, penilaian sumber, penafsiran kemudian dituangkan menjadi suatu kisah sejarah dalam bentuk tulisan. Aspek kronologis sangat penting dalam penulisan

sejarah karena dapat mengetahui perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam suatu peristiwa sejarah.

Dalam tahap ini diperlukan suatu imajinasi historis yang baik sehingga fakta-fakta sejarah menjadi kajian utuh sistematis, serta komunikatif. Penyajian penelitian dalam bentuk tulisan mempunyai tiga bagian, yaitu pengantar, hasil dan kesimpulan. Tahap penyajian ini merupakan tahap akhir bagi penulis untuk menyajikan semua fakta kedalam bentuk tulisan skripsi.

2. Pendekatan Penelitian

Untuk mengungkap peristiwa dalam penulisan sejarah, perlu dilakukan pendekatan multidimensional agar permasalahan yang diteliti dapat diungkapkan secara komprehensif. Pendekatan yang akan saya gunakan dalam memperjelas permasalahan yang terjadi dalam menggunakan pendekatan politik, sosiologis, budaya dan ekonomi. Sartono Kartodirdjo berpendapat bahwa pendekatan politik dimaksudkan untuk menyoroti struktur kekuasaan dan sebagainya.²⁵ Pendekatan Sosiologis menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu pendekatan yang menerangkan peranan sosiologi dalam menjelaskan perilaku manusia. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui interaksi antara Tionghoa dengan masyarakat pribumi.

Pendekatan budaya bertujuan untuk mengetahui structural kebudayaan Tionghoa di Yogyakarta pasca reformasi. Melalui pendekatan inilah akan

²⁵ Helius Sjamsudin, *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak, 2007, hlm. 63.

dikupas tentang kebudayaan Tionghoa. Sedangkan pendekatan ekonomi bertujuan untuk mengaitkan pandangan ekonomi Tionghoa pada masa pasca reformasi dalam perkembangannya dewasa ini.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi berguna untuk memperoleh gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai isi dari skripsi tersebut. Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama berupa pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan yang berisi manfaat bagi penulis dan manfaat bagi pembaca, kajian pustaka, historiografi yang relevan, metode penelitian, pendekatan penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang latar belakang masuknya Tionghoa Islam ke Indonesia, latar belakang masuknya Tionghoa ke Yogyakarta, islamisasi Tionghoa di Indonesia, dan islamisasi Tionghoa di Yogyakarta.

Bab ketiga berisi analisa tentang keadaan Tionghoa Islam Indonesia dan Yogyakarta pada bidang ekonomi, sosial, politik dan budaya sebelum terjadinya reformasi 1998.

Bab keempat berisi pembahasan tentang Tionghoa Islam di Yogyakarta setelah reformasi 1998 sampai tahun 2010 dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya. Bab kelima berisi kesimpulan, saran, daftar pustaka, dan lampiran.